



PENTINGNYA ASPEK KAPABILITAS DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA PAPUA: REFLEKSI KRITIS TERHADAP KEMISKINAN KOMPLEKS DI PAPUA BERDASARKAN PERSPEKTIF AMARTYA SEN

Hery Herjawan¹, Herdito Sandi Pratama²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali pentingnya aspek kapabilitas dalam pembangunan manusia di Papua, dengan menggunakan pandangan Amartya Sen sebagai bahan refleksi kritis. Di Papua, terdapat tantangan kemiskinan kompleks yang melibatkan beragam faktor seperti ketidaksetaraan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, Amartya Sen menawarkan pendekatan yang luas dan inklusif untuk mengukur kesejahteraan manusia, yang melibatkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan individu, dan partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kapabilitas Amartya Sen memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan manusia di Papua. Kapabilitas menjadi landasan yang kuat untuk mengatasi kemiskinan kompleks, karena memperhatikan kebutuhan dan aspirasi individu serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.

Kata Kunci: *Kapabilitas, Amartya Sen, Papua, Kemiskinan, Otonomi Khusus.*

Pendahuluan

Papua secara umum dikenal dengan suatu wilayah dengan multi- persoalan. Salah satu persoalan terbesar di Papua yang diakui oleh berbagai penelitian seperti Muridan, Anderson, dan Chauvel adalah soal kesejahteraan yang berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di Papua. Secara umum, situasi kemiskinan dan situasi kompleks di Papua dapat digambarkan dalam dua hal. Pertama adalah situasi kuantitatif yang dapat dihitung secara matematis melalui survei maupun data yang dianalisis, dan kedua adalah situasi kualitatif yang dapat diobservasi dan ditinjau dalam beberapa penelitian-penelitian mendalam (Widjojo, 2010; Anderson, 2015; Chauvel, 2005).

Terkait dengan situasi kuantitatif di Papua, dapat dirujuk beberapa item persoalan. Pertama adalah posisi Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan data BPS tahun 2021 merupakan provinsi paling miskin di Indonesia dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia (Jayani, 2021). Kemudian, dalam analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Papua tahun 2022 hanya memiliki skor 61,39. Skor ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM di Indonesia pada tahun yang sama sebesar 72,91 (Badan Pusat Statistik, 2022). Jika dibandingkan dengan IPM dunia, skor Papua masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 73,2. Kemudian berdasarkan data BPS tahun 2020, Papua merupakan provinsi yang memiliki indeks kesempatan kerja, akses kesehatan, dan akses pendidikan yang rendah. Secara kuantitatif rendahnya aspek-aspek tersebut disebabkan oleh minimnya jumlah fasilitas keKesehatan, pPendidikan, dan bisnis yang berkembang di Papua. Pada soal lain, berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kematian ibu dan anak yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Badan Pusat

Statistik, 2020).

Secara kualitatif, terdapat beberapa situasi yang mempengaruhi kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP) di Papua. Situasi pertama adalah adanya kondisi konflik yang menyebabkan OAP memiliki ketakutan dalam menjalani hidup di Papua. Kehidupan OAP dibayangi dengan kekerasan yang sejak Orde Baru hingga kini masih berlangsung. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua disebabkan oleh adanya upaya Kelompok Kriminal Bersenjata / Organisasi Papua Merdeka (KKB / OPM) dalam menghasilkan keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia (Amiruddin, 2006). Mereka beroperasi di wilayah Papua Pegunungan, namun berdampak pada seluruh OAP di berbagai wilayah di Papua. Konflik dan kekerasan menyebabkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu mengalami kendala di Papua (King & Elmslie, 2001). Beberapa contoh kasus di antaranya adalah pembunuhan pekerja Istaka Karya di Nduga pada tahun 2019 yang menyebabkan pembangunan jembatan terhenti, kemudian pada akhir tahun 2022 terjadi penyanderaan pilot Susi Air yang menyebabkan berhentinya operasi distribusi barang dari pusat pemerintahan Papua Tengah (Mimika) ke Nduga (Costa, 2023).

Konflik dan kekerasan menyebabkan akses terhadap sumber daya kesejahteraan yang dimiliki oleh OAP semakin terbatas dengan situasi keterbatasan yang ada. Pada tahun 2021, ditemukan beragam kasus stunting yang menyebabkan korban pada anak-anak Papua di pedalaman. Pemerintah mengakui luput memprediksi kasus stunting tersebut karena keterbatasan sumber daya pemerintah lokal dalam memitigasi (Muhsidin, 2023). Di antara persoalan kesejahteraan yang minim dan kompleks, terdapat persoalan sosial yang dialami oleh OAP. Pada tahun 2019 terjadi kasus diskriminasi dalam bentuk rasisme yang diterima oleh anak muda OAP di Surabaya. Kasus ini menjadi sumber konflik baru di Papua di mana mereka merasa bahwa perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap mereka telah mencapai titik puncaknya (Belarminus, 2019).

OAP secara kualitatif dapat dilihat sebagai entitas yang memiliki serangkaian pengalaman buruk atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Terjadi berbagai pelanggaran HAM sejak masa pemerintahan Orde Baru seperti kasus Biak tahun 1974, Timika, 1977, Wamena 1978, Wasior 2001, Theys Eluay 2022, dan Paniai 2014 adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah menimpa masyarakat Papua (Amiruddin, 2006). Situasi pelanggaran HAM tersebut dapat merepresentasikan adanya persoalan kompleks di Papua yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan di Papua. Dalam pandangan Muridan, isu HAM menyebabkan adanya resistensi masyarakat Papua terhadap pembangunan yang dilakukan oleh negara. Resistensi ini menyebabkan kemiskinan menjadi sul untuk diselesaikan di Papua.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan metode kritis sebagai model analisis melalui pengumpulan data secara kualitatif. Dalam metode kritis yang digunakan, terdapat dua tinjauan yang dilakukan. Pertama adalah tinjauan historis yang mengkaji studi kasus mengenai situasi kemiskinan kompleks di Papua, dan kedua adalah tinjauan konseptual yang meninjau pandangan konseptual Amartya Sen mengenai pemikirannya mengenai functioning dan capability. Untuk memenuhi kedua tinjauan tersebut, studi kualitatif menjadi metode pengumpulan data dengan studi pustaka yang terdiri dari berbagai rujukan penelitian sebelumnya, karya tulis Amartya Sen, dan data-data penunjang lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

Pendekatan dalam Penanganan Kemiskinan di Papua

Dalam mengatasi persoalan di Papua, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan politik, sosial, dan pembangunan ekonomi. Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan mengenai pembangunan Papua sudah dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Pada masa ini pemerintah menerapkan kebijakan Repelita yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur di Papua. Namun dalam masa pembangunan ini, terdapat berbagai macam resistensi masyarakat Papua, karena pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru menghasilkan banyak diskriminasi pada masyarakat, khususnya masyarakat adat yang alamnya menjadi korban dari pembangunan infrastruktur. Pada masa Orde Baru, tambang PT. Freeport mulai dibuka pada masa pemerintah Orde Baru dan mendapatkan resistensi masyarakat karena merusak lingkungan alam dan lingkungan sosial masyarakat Papua. Akibat resistensi tersebut, pemerintah pada saat itu bereaksi dengan menurunkan militer ABRI yang berfungsi mengamankan kebijakan pembangunan di Papua. Hasilnya adalah pembangunan di Papua diiringi dengan pengekangan kebebasan masyarakat Papua dan diskriminasi pada masyarakat Papua. Hal ini dapat ditinjau dari beragam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua (Anderson, 2015).

Pada tahun 1998, terjadi perubahan rezim dalam pemerintah Indonesia di mana pemerintahan Orde Baru yang berbau militeristis, digantikan dengan rezim yang demokratis. Masa perubahan ini disebut dengan masa reformasi. Pada masa reformasi pemerintah mulai untuk memikirkan kembali soal pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, termasuk Papua. Salah satu kesadaran utama pemerintah dalam soal pembangunan adalah adanya ketertinggalan akut di Papua. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya kebijakan-kebijakan yang berbasis afirmasi pada Papua (Widjojo, 2010). Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan prioritas kepada Papua dalam tumbuh dan berkembang sehingga tidak mengalami ketertinggalan ekstrem dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Kemudian kebijakan pada era reformasi adalah program peningkatan kapabilitas, dan penguatan representasi politik untuk mendukung pembangunan yang inklusif untuk Papua.

Otonomi khusus (Otsus) merupakan upaya pemerintah untuk membuat perimbangan ekonomi dalam hal pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur di Papua. Tujuannya adalah agar Papua dapat mengejar ketertinggalan ekonomi sesuai dengan standar yang setara dengan provinsi lain. Dalam upaya mengatasi persoalan Papua yang kompleks maka pemerintah menetapkan kebijakan Otsus yang mayoritas memiliki semangat afirmasi. Kebijakan utama pemerintah dalam mengupayakan hal tersebut adalah melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2001 dan diperbarui dalam UU No. 2 Tahun 2021.

Secara reflektif, UU tersebut mengupayakan implementasi tindakan afirmasi terhadap OAP, baik dari sudut pandang sosial, politik, maupun ekonomi. Secara politik, UU Otsus menjamin bahwa representasi masyarakat adat Papua dalam pemerintahan dibentuk dan diwenangkan dengan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP). Berdasarkan pasal 20 UU No. 21 Tahun 2001, MRP memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar OAP yang dilandasi dengan proteksi dengan penghormatan terhadap adat, budaya, seni, pemberdayaan, religi, perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. MRP diwakili oleh masyarakat OAP yang wajib memberikan perlindungan terhadap:

1. Perlindungan hak hidup orang Papua di tanah Papua yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut, serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya

secara baik dan proporsional;

2. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya;
3. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat;
4. Perlindungan kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak mana pun;
5. Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat orang Papua.

Bentuk representasi lain OAP dalam kehidupan politik adalah dengan menetapkan keharusan kepala daerah di Papua berasal dari OAP. Secara spesifik hal aturan kepala daerah harus berasal dari OAP diatur dalam UU Otsus untuk memastikan bahwa kepentingan OAP tidak direpresentasikan oleh non-OAP.

Dalam soal sosial-ekonomi, UU Otsus memberikan jaminan otonomi kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengelola sumber daya lokalnya dalam membangun kesejahteraan dan melindungi kebahagiaan warga masyarakatnya. Dalam UU Otsus bentuk representasi pemerintah sendiri adalah pemberian dana otonomi khusus bagi Papua. Dana Otsus menjadi anggaran pemerintah daerah Papua untuk melakukan pembangunan. Keuangan daerah Papua sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah dan tidak diintervensi oleh kebijakan pemerintah pusat. Hal ini menjadi pembeda yang kontras dengan provinsi lain di mana kebijakan pembangunan mayoritas diatur oleh pemerintah pusat. Pada kasus lain, Otsus juga memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan agenda pembangunan dengan aspirasi lokal sehingga pembangunan dan anggaran pembangunan dapat digunakan pada pos-pos yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Otsus memberikan jaminan pada pemerintah Papua untuk tidak mengikuti secara fixed tuntutan model pembangunan nasional, dasar kebebasan mengatur pemerintah ini sendiri menjadi salah satu representasi hak minoritas di Papua.

Bentuk lain dari program afirmasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua adalah beasiswa khusus bagi siswa dan mahasiswa Papua. Pengkhususan ini ditujukan agar OAP dapat mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana standar pendidikan layak pada umumnya bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tahun 2015 memberikan beasiswa pendidikan khusus kepada anak muda Papua untuk bersekolah di luar Papua (Kemendikbud, 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan pemerataan kualitas kesempatan pendidikan kepada OAP. Bentuk program afirmasi lain adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada OAP untuk dapat direkrut dalam birokrasi. Salah satu contohnya adalah program Bintara Noken, di mana rekrutmen kepolisian lokal di Papua ditargetkan kepada OAP sehingga pos-pos anggota Polisi yang bertugas di Papua berasal dari OAP.

Pada sisi yang lain, pemerintah menerapkan beragam program peningkatan kapabilitas agar OAP mendapatkan kesempatan dalam memenuhi kebutuhannya secara bebas tanpa ada batasan terhadap kondisi-kondisi yang tidak dapat mereka atasi sendiri seperti soal kesehatan dan kemiskinan. negara melalui aparatnya di Papua berupaya memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Berbagai jenis bantuan diberikan oleh negara seperti bantuan pangan pada masyarakat di wilayah terdampak konflik di Nduga pada tahun 2019, bantuan perumahan masyarakat di wilayah Yahukimo pada tahun 2018, dan bantuan sosial lainnya (Prionggo, Djaenuri, Lukman, & Sinurat, Juni 2019). Polri secara aktif juga menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya seperti yang dilakukan dalam

program Binmas Noken (2018-2020) dengan memberikan akses pangan melalui bantuan peternakan dan pertanian (TBNews, 2021). Swasta secara partisipatif juga dipaksa oleh negara untuk turut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua yang belum terpenuhi. Paksaan ini dilakukan melalui upaya mewajibkan CSR dari operasi bisnis PT. Freeport Indonesia agar dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat Papua (PTFI, 2018).

Beberapa upaya untuk pemenuhan akses pendidikan dasar, kesehatan, dan pekerjaan juga dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat sipil seperti LSM dan gereja. Beberapa contoh program yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemenuhan akses dasar diantaranya adalah program Polisi Mengajar (Pi-Ajar), klinik, gratis dari kementerian kesehatan, dan sebagainya. Partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua juga dapat dilihat dari adanya klinik-klinik gratis di pedalaman Papua yang diinisiasi oleh Yayasan Siloam, bantuan pangan dari gereja lokal, serta aktivitas pembinaan kewirausahaan yang diinisiasi oleh lembaga donor seperti Misol di daerah Raja Ampat.

Refleksi Sen dalam Soal Pembangunan di Papua

Dari seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penting untuk mempertanyakan apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan insiatif demokratis terhadap Papua sudah memenuhi tuntutan kapabilitas dan martabat OAP? Untuk menjawab hal tersebut, setidaknya dapat diuji melalui empat aspek yaitu; pertama, mengenai kapabilitas sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Kedua, apakah upaya peningkatan kapabilitas disertai dengan komitmen menciptakan functioning dari OAP. Ketiga, dampak yang dihasilkan dari kebijakan. Keempat, persepsi yang dihasilkan oleh OAP terhadap pemerintah.

Dalam soal kapabilitas sebagai kebebasan yang sesungguhnya, Sen menginginkan agar kapabilitas ditentukan oleh pilihan fokusnya pada signifikansi moral dari kemampuan individu untuk mencapai jenis kehidupan yang mereka hargai. Ini membedakannya dari pendekatan evaluasi etis yang lebih mapan, seperti utilitarianism atau resourcism, yang berfokus secara eksklusif pada kesejahteraan subjektif atau ketersediaan sarana untuk kehidupan yang baik. Kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik didefinisikan dalam kerangka rangkaian makhluk dan perbuatan yang berharga seperti berada dalam kesehatan yang baik atau memiliki hubungan baik dengan orang lain (Sen, *Commodities and Capabilities*, 1985).

Kapabilitas telah digunakan secara luas dalam konteks pembangunan manusia, misalnya, oleh PBB, sebagai alternatif yang lebih luas dan lebih dalam untuk mengukur metrik ekonomi yang sempit seperti pertumbuhan PDB per kapita. Di sini 'kemiskinan' dipahami sebagai kekurangan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baik, dan 'pembangunan' dipahami sebagai perluasan kemampuan agar manusia dapat mengeluarkan diri dari kehidupan yang tidak baik. Secara reflektif, OAP dengan seluruh program pembangunan ala negara tersebut terasa masih belum memiliki kapabilitas ekonomi yang mumpuni, karena perlakuan peningkatan kapabilitas cenderung dilakukan secara top down. Dengan perlakuan peningkatan kapabilitas yang top down maka sebenarnya pemerintah memaksakan model utilitarian dalam programnya dengan mengharapkan kemiskinan dapat diselesaikan dengan menyuntikkan insentif melalui bantuan sosial kepada OAP.

Namun pada sisi yang lain, beberapa kebijakan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk membangun kapabilitas OAP. Kebijakan afirmasi beasiswa pendidikan, otonomi khusus, pemerintahan sendiri, penyediaan fasilitas kesehatan, serta kebijakan afirmasi polisi lokal adalah upaya peningkatan kapabilitas. Namun, dalam praktiknya terhadap item

penyediaan fasilitas kesehatan, afirmasi polisi lokal, dan pemerintahan sendiri sering kali tidak luput dari inefektivitas. Persoalan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme mewarnai pelaksanaan otonomi khusus sehingga kapabilitas yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh OAP. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah adanya program-program pembinaan peternakan dan pertanian yang dibentuk oleh pemerintah di wilayah Jayapura. Padahal, daerah Jayapura adalah salah satu daerah paling maju di Papua. Seharusnya program tersebut diberikan kepada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan program tersebut.

Refleksi selanjutnya dari pandangan Sen tentang kapabilitas yang hendak dicukupkan melalui kebijakan otsus adalah adanya indikasi program-program kesejahteraan yang tidak disertai dengan penciptaan fungsi bagi manusia OAP. Aspek kebebasan dan HAM adalah upaya yang seharusnya menjadi prinsip awal dari pembangunan melalui peningkatan kapabilitas. Persoalan HAM masih menjadi persoalan serius karena berdampak pada stabilitas di Papua. Dengan tidak adanya stabilitas keamanan, maka sulit untuk mengandaikan adanya kontinuitas pembangunan di Papua.

Kondisi sosial ekonomi tersebut telah berlangsung sejak Papua menjadi bagian integral Indonesia setelah referendum 1963. Papua setelah masuk dalam bagian Indonesia, harus menghadapi pemerintahan Orde Baru yang bermasalah dengan HAM. Papua mengalami berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat proyek pemerintah Orde Baru dalam mengamankan proyek strategis nasional di Papua. Dalam masa Orde Baru, Papua dan beberapa provinsi lain di wilayah timur Indonesia dikucilkan dari prioritas pembangunan yang berpusat di Jawa sehingga tidak berdaya saing dengan wilayah lain khususnya provinsi di wilayah barat Indonesia. Persoalan berjalan lebih lanjut dengan program transmigrasi orang Jawa ke Provinsi Papua. Orang Jawa mendapatkan perlakuan yang lebih spesial pada masa Orde Baru untuk mendapatkan kesempatan kerja di Papua sehingga OAP merasa mendapatkan pengucilan secara sosial, politik, dan ekonomi (Chauvel, 2005).

Kemajuan orang Jawa di Papua yang mendapatkan prioritas dari pemerintah menyebabkan munculnya resistensi masyarakat OAP terhadap eksistensi pemerintah Indonesia dan entitas lain yang berkaitan dengan Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan adanya berbagai macam bentuk diskriminasi yang menyebabkan OAP merasa mereka minoritas di tanah mereka sendiri selama Orde Baru di samping pelanggaran HAM yang kerap terjadi dengan adanya operasi aparat militer di Papua pada masa tersebut. Hal ini menjadi dasar resistensi OAP sehingga termanifestasi dalam bentuk konflik di Papua. Muncul Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB), dan organisasi resistensi lainnya (Anderson, 2015). Manifestasi ini menggerakkan konflik yang belum selesai dari masa Orde Baru hingga saat ini. Kejadian paling baru (2023) adalah adanya penyanderaan Pilot Susi Air oleh OPM dengan tuntutan tebusan agar pemerintah Indonesia mengadakan referendum kembali agar Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia (Costa, 2023).

Dalam soal kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri, secara formal OAP memiliki akses untuk melakukan hal tersebut. Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut dibatasi dalam kerangka 'keutuhan NKRI'. Batasan tersebut dapat ditinjau melalui larangan untuk memberikan pendapat atau mengekspresikan sesuatu yang memiliki 'nada' melepaskan diri dari NKRI. Bagi orang-orang yang mengekspresikan pendapat dengan konten melepaskan diri dari NKRI, maka hukuman pidana keamanan negara dapat dijatuhkan kepada mereka. Beberapa kasus pembatasan ini dapat dilihat dari banyak kasus di masa Orde Baru yang menyebabkan munculnya fenomena diaspora OAP ke luar negeri

seperti Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru (King & Elmslie, 2001).

Kasus lain yang berkaitan dengan pembatasan hak berpendapat juga ditunjukkan melalui isu kebebasan pers di Papua. Pers yang berasal dari luar negeri mendapatkan larangan untuk meliput ataupun berkorespondensi di Papua. Larangan pemerintah tersebut terlihat jelas diimplementasikan pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa reformasi dengan pemerintahan yang demokratis, akses jurnalistik di Papua mulai dibuka, walaupun belum sepenuhnya terbuka (Andini, 2023).

Dalam sistem aspirasi masyarakat terhadap pembangunan, masyarakat OAP mengalami pengalaman unik berupa pengekangan kebebasan dalam memberikan aspirasi pembangunan. Pengekangan ini berasal dari pemerintah lokal yang justru dipimpin oleh OAP sendiri. Pengekangan muncul karena banyak praktik korupsi dan kolusi yang terjadi dalam pembangunan di Papua. sejumlah pengekangan dan pembatasan terhadap masyarakat sipil Papua dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengancaman, suap, dan sebagainya (Sugandi, 2008).

Dalam aspek kebebasan untuk mendapatkan perlakuan yang setara, hal ini mengalami situasi yang problematik. Pada prinsipnya negara memberikan perlakuan yang setara pada semua warga negaranya tanpa membedakan agama, etnis, maupun ras. Namun dalam praktiknya, sering kali OAP mendapatkan perlakuan yang tidak setara oleh unsur-unsur pelaksana negara. Beberapa contoh perlakuan yang tidak setara tersebut di antaranya adalah perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan publik.

Dampak dari situasi tersebut adalah munculnya persepsi bahwa OAP masih merupakan bagian yang terjajah dari Indonesia, tidak mendapatkan kesejahteraan, berkorelasi dengan munculnya etno-nasionalisme, instabilitas keamanan, dan dampak pada kemiskinan yang berkelanjutan. Mereka merasa tidak mendapatkan hak dan kebebasan walaupun kebijakan pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, narasi yang muncul pada OAP khususnya kelompok resisten Papua seperti OPM, adalah bahwa kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan diacuhkan oleh pemerintah Indonesia melalui sikap diskriminatif yang intens terhadap Papua.

Dalam pandangan Sen, kesejahteraan bukan hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan individu, dan partisipasi politik. Sen percaya bahwa kesejahteraan sejati tercapai ketika individu memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka dan hidup dengan martabat.

Ia juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Menurut Sen, ketidaksetaraan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berargumen bahwa ketimpangan yang ekstrem menghasilkan ketidakadilan yang melanggar prinsip dasar kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berupaya untuk mencapai keadilan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil (Sen, Development as Freedom, 1999).

Jika orang-orang Papua mengalami perlakuan diskriminatif yang intens, hal tersebut dapat menjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan yang menjadi narasi primer bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pandangan Amartya Sen dapat menguatkan pandangan ini, karena ia menekankan perlunya mengatasi ketidaksetaraan, ketimpangan, dan diskriminasi sebagai langkah penting dalam memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, penekanan pada pentingnya kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan menggarisbawahi perlunya mengevaluasi dan memperbaiki situasi di Papua agar orang-orang Papua dapat merasakan manfaat yang sama dari pembangunan dan

memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Sen mendorong adanya dialog, partisipasi, dan pemberdayaan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua terpenuhi, sehingga masyarakat Papua dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima.

Dengan memperhatikan pandangan Amartya Sen, kita dapat mengakui pentingnya memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Papua, serta memastikan bahwa tindakan diskriminatif tidak terjadi secara sistematis atau intensif terhadap kelompok tersebut. Harapannya adalah aspek kapabilitas dalam pembangunan manusia Papua dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini terdeteksi bahwa sudah ada upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan di Papua melalui program-program pemerintah dengan abstraksi untuk memenuhi aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, representasi politik, dan sebagainya. Namun upaya tersebut belum menghasilkan pembangunan yang berkeadilan di Papua, sehingga kemiskinan di Papua terus-menerus terjadi dan semakin kompleks. Salah satu penyebabnya adalah karena ada persoalan martabat yang belum terselesaikan dengan pembangunan ala pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat melalui model pembangunan di Papua yang cenderung bersifat top down (dari atas kebawah) dengan intervensi langsung pemerintah tanpa memperhatikan secara cukup aspirasi masyarakat Papua. Pada sisi yang lain, pembangunan di Papua masih terasa mengenyampingkan aspek functioning OAP sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Secara reflektif melalui pemikiran Amartya Sen tentang pembangunan, seharusnya pembangunan di Papua berpijak pada kesejahteraan yang tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata. Kesejahteraan masyarakat Papua harus mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan individu, dan partisipasi politik. Sen percaya bahwa kesejahteraan sejati tercapai ketika individu memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka dan hidup dengan martabat.

Dalam pembangunan di Papua, penting untuk menekankan keadilan sosial. Ketidaksetaraan yang tinggi antara masyarakat Papua dan non-Papua dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang ekstrem menghasilkan ketidakadilan yang melanggar prinsip dasar kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berupaya untuk mencapai keadilan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil di Papua dalam upaya melawan kemiskinan kompleks di Papua.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2006). Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman. Jurnal Penelitian Politik, 3-23.
- Anderson, B. (2015). Papua's Insecurity: State Failure in The Indonesian Periphery. Singapore: East-West Center.
- Andini, N. I. (2023, Maret 28). Kawanhukum. Retrieved from Keterbatasan Kebebasan Pers di Papua: <https://kawanhukum.id/keterbatasan-kebebasan-pers-di-papua/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Provinsi Papua Dalam Angka Papua Province in Figures 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Belarminus, R. (2019, 12 30). Kompas. Retrieved from KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua,

- Buntut Kasus Rasial dan Hoaks Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Rasial dan Hoaks", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07:https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all>
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington DC: East West Center.
- Costa, F. M. (2023, Juni 8). Kompas. Retrieved from Empat Bulan Pilot Susi Air Ditawan, Negosiasi Masih Mandek: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/08/empat-bulan-pilot-susi-air-ditawan-negosiasi-masih-mandek>
- Jayani, D. H. (2021, Februari 15). Penduduk Miskin Indonesia Bertambah Jadi 27,55 Juta per September 2020. Retrieved from Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/penduduk-miskin-indonesia-bertambah-jadi-2755-juta-per-september-2020>
- Kemendikbud. (2023). Web Resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved from Program Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi: Membangun Bangsa Melalui Perluasan Akses Pendidikan Tinggi: <https://adik.kemdikbud.go.id>
- King, P., & Elmslie, J. (2001). *Comprehending West Papua*. Sydney: Center for Peace and Conflict Studies.
- Muhsidin. (2023, Maret 13). Upaya berkelanjutan menurunkan stunting anak Papua. Retrieved from Antaranews: <https://papua.antaranews.com/berita/700488/upaya-berkelanjutan-menurunkan-kasus-stunting-anak-di-papua>
- Prionggo, K., Djaenuri, A., Lukman, S., & Sinurat, M. (Juni 2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. *Jurnal Visioner* Vol. 11, No. 2., 91-106.
- PTFI. (2018, Oktober 18). Lakukan CSR, Freeport Fokus di Empat Bidang Ini. Retrieved from PT Freeport Indonesia: <https://ptfi.co.id/id/news/detail/implementing-csr-freeport-focuses-on-four-sectors>
- Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North-Holland.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Sen, A., & Nussbaum, M. (1993). *The Quality of Life*. London: Clarendon Press.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: FNS.
- TBNews. (2021, Agustus 26). *Tribrata News*. Retrieved from Binmas Noken Papua Beri Pembinaan Kepada Petani dan Peternak Kelinci di Lanny Jaya: <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/binmas-noken-papua-beri-pembinaan-kepada-petani-dam-peternak-kelinci-di-lanny-jaya-9540>
- Widjojo, M. S. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Obor.